

Pajak dan Kelas-Kelas Yang Terlupakan: *Dari Magna Carta hingga Revolusi Inggris*

John Passant¹

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Dwi Platomo
Disunting oleh Muhammad Al-Fayyadl

Abstrak

Tulisan ini melihat tiga peristiwa kunci awal dalam sejarah pajak di Inggris, Magna Carta di tahun 1215, Pemberontakan Petani di tahun 1381, dan Revolusi Inggris dari 1640 sampai 1649. Tulisan ini menggunakan peristiwa-peristiwa ini untuk menjelajahi hubungan antara pajak, perang, demokrasi, dan pemberontakan. Pajak merupakan ekspresi sekaligus penyebab perpecahan kelas yang, seperti ditunjukkan oleh peristiwa-peristiwa ini, dapat menyulut pemberontakan melawan negara yang memaksakan pajak. Pemberontakan-pemberontakan ini dapat terjadi antar-anggota elite yang berkuasa, atau antara rakyat di luar elite yang berkuasa dan kelompok penguasa-penguasa tersebut, baik dalam arti politik, ekonomi, atau perpaduan antara politik dan ekonomi. Tujuannya adalah memperkenalkan kembali (konsep) kelas dalam sejarah pajak dan menunjukkan peran yang dimainkan rakyat biasa (misalnya, kaum tani, perajin, dan buruh) dalam sejarah perpajakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, rakyat London memainkan peran dalam pemberontakan para bangsawan (*Baron*) yang berhasil melawan pemaksaan pajak yang tak wajar oleh raja, dan pendirian suatu dewan penasihat umum (*common counsel*) dari kaum elite untuk menyetujui pengambilan pajak di kemudian hari. Capaian ini menjadi landasan bagi tuntutan-tuntutan demokratis di masa mendatang, misalnya, tidak ada perpajakan tanpa melibatkan badan perwakilan. Kaum tani mendorong pemberontakan pada 1281 terhadap pajak pemilihan umum² (*poll taxes*), namun tak mampu membuat tuntutan-tuntutan yang melampaui posisi kelas khusus mereka, walaupun mereka menyiratkan suatu masyarakat alternatif yang tak terbagi-bagi menurut kelas. Pada 1629, kebijakan Upeti Kapal (*Ship Money*) memungkinkan Raja berkuasa tanpa persetujuan parlementer; ini pada gilirannya menyulut perlawanan dan kemudian revolusi dari tahun 1640, dalam konteks suatu masyarakat yang berubah dari relasi-relasi feodal menuju relasi-relasi kapitalis. Dalam tiga kasus ini, tindakan-tindakan massa rakyat biasa merupakan kunci guna memahami peristiwa-peristiwa dan berkelindannya perang, pajak, demokrasi, dan perlawanan yang akan menjadi terang dalam penelitian ini.

¹ Peneliti pada Australian National University (ANU), ko-editor *Journal of Australian Taxation*.

² Penerjemahan "*poll tax*" menjadi "*pajak pemilihan*" didasarkan pada makna substansial dari "*poll tax*" dilihat dari konteks sejarahnya, yaitu bahwa pajak ini ditarik untuk membatasi hak memilih orang-orang pada saat itu. Itulah alasan penerjemah menerjemahkan "*poll tax*" menjadi "*pajak pemilihan*" alih-alih "*pajak kepala*", istilah yang secara umum digunakan sebagai terjemahan untuk "*poll tax*". Dalam artikel ini, pajak ditarik sebagai syarat untuk pemilihan umum di Inggris di kalangan petani dan rakyat jelata.– *Jurnal Sosialis*

Kata Kunci: pajak, sejarah, perubahan sosial, pemberontakan, sejarah perpajakan

I. Pengantar

Mengikuti artikel sebelumnya dalam seri ini (Passant 2016), tulisan ini meneliti keterkaitan antara pajak, perang, demokrasi dan perlawanan. Di sini saya berupaya untuk membawa kelas dan perjuangan kelas dalam kajian sejarah pajak. Ini adalah yang pertama dari sejumlah artikel yang melihat peristiwa-peristiwa khusus dalam sejarah pajak selama kurun ribuan tahun.

Saya memasukkan tiga peristiwa kunci dalam sejarah Inggris yang didorong oleh pertimbangan-pertimbangan pajak, yaitu Magna Carta 1215, Pemberontakan Kaum Tani 1381, dan Revolusi Inggris 1640-1649. Ketiganya disulut oleh pajak dan melibatkan rakyat biasa, bukan hanya elite yang sedang berkuasa atau elite-elite yang ingin berkuasa. Pada 1215, para bangsawan tak akan mungkin berhasil tanpa dukungan dari rakyat London. Pemberontakan Kaum Tani pada 1381, sesuai namanya, merupakan pemberontakan para petani, dalam hal ini melawan serangkaian pajak pemilihan umum. Mulai 1629, Raja Charles I menarik Upeti Kapal – suatu hak tradisional para raja untuk meminta kapal-kapal dan orang-orang dari kota-kota pelabuhan untuk melindungi negara, atau, seiring waktu, menyediakan uang sebagai gantinya (Keir 1936) – dalam suatu upaya untuk mendanai rezimnya tanpa dukungan Parlemen, dan hal ini menyulut suatu pemberontakan oleh kekuatan-kekuatan tersebut, yang melibatkan setiap bagian dari masyarakat.

Tiga peristiwa ini mendukung argumen bahwa pajak merupakan elemen kunci dalam sejarah, sebuah cerminan dari kontradiksi-kontradiksi dalam masyarakat kelas dan pemicu pemberontakan, baik dari elemen-elemen kelas yang sedang berkuasa, atau permusuhan sesama “saudara” (kelas) (Marx 1974; Moseley 2002) maupun dari kaum yang diperalat dan yang tertindas – dalam istilah Marxis, mereka yang menghasilkan kekayaan ekonomi masyarakat bagi kelas yang sedang berkuasa – yakni kaum tani, para perajin, buruh, dan lainnya, yang terkena dampak oleh pajak dan secara lebih umum oleh peran dan posisi mereka dalam masyarakat.

Mari mulai dengan Magna Carta, suatu dokumen yang kata-katanya terus menggema sepanjang sejarah hingga hari ini, kapan pun bendera kebebasan dikibarkan.

II. Magna Carta, Perlawanan Pajak Para Bangsawan

Magna Carta pada 1215 merupakan hasil sebuah perang yang gagal dan pajak yang tak wajar (Breay & Harrison 2015). Ini adalah “sebuah dokumen egois yang di dalamnya para bangsawan elite mengejar kepentingan-kepentingannya sendiri” (Carpenter 2015, h. 107), hasil dari sebuah pertarungan oleh “para bangsawan preman” (Robertson 1999, h. 3) (yang bertujuan) untuk membatasi kekuasaan raja atas pajak, di samping hal-hal lainnya. (Carpenter 2015). Memang, David Carpenter menyimpulkan terlalu jauh hingga berkata, ini “terutama berkaitan dengan uang. Tujuan terbesarnya adalah membatasi kemampuan raja untuk mengambil (uang) dari warganya” (Carpenter 2015, h. 24). Seperti yang dirumuskan oleh Claire Breay dan Julian Harrison dari *British Library*: “Magna Carta menyatakan bahwa tidak ada pajak yang dapat ditarik tanpa ‘kesepakatan umum dari suatu wilayah’, artinya para bangsawan dan petinggi gereja” (Breay & Harrison 2015). Menurut mereka, “ini membangun kembali hak-hak istimewa setelah sebelumnya hilang” (Breay & Harrison).

Dalam arti ini, hal ini merupakan perselisihan intra-kelas, pertarungan antar-anggota kelas yang sedang berkuasa. Permusuhan saudara, anggota-anggota berbeda dari kelas yang berkuasa, telah pecah. Dalam menerapkan kebijakan seluas-luasnya bagi orang-orang bebas, Magna Carta menyisihkan mayoritas dari rakyat Inggris pada waktu itu, mereka yang tak bebas – sekelompok kelas petani yang harus menyediakan kerja tanpa upah bagi penguasa (Carpenter 2015). Hal ini tidak hanya menyisihkan mereka, ini mendiskriminasi mereka (Carpenter 2015). Ini juga mendiskriminasi kaum perempuan (Carpenter 2015). Raja berpikir bahwa kaum Yahudi adalah miliknya, dan dia dapat, nyatanya, menarik pajak dari mereka semau-maunya.

Sementara Magna Carta terkadang bertindak terlalu jauh ketimbang hanya berurusan dengan kepentingan para bangsawan dan menguntungkan mereka yang bebas, pajaklah yang telah mendorong para bangsawan untuk melawan, dan pajak itu diterapkan ke seluruh masyarakat, atau setidaknya mereka yang mampu membayar. Satu contoh pajak tak wajar yang dirujuk oleh Breay dan Harrison (2015) diberlakukan pada 1207.

Di awal masa pemerintahan John, inflasi membuat harga-harga naik tiga kali lipat, lalu kemudian turun sedikit dua kali lipat dibandingkan tahun-tahun pertama pemerintahannya (Carpenter 2015). Tak hanya itu. Raja-raja sebelumnya telah menjual beberapa wilayah yang pendapatannya sedang naik (Carpenter 2015); lepasnya Normandy dan pendapatan yang mengalir darinya (Hughes & Oats 2007) dan kampanye Prancis tahun 1206 menambah tekanan lebih besar atas kas kerajaan. Lebih jauh, menurut Hughes dan Oats, (Hughes & Oats 2007), mengutip Ormrod, (1999), “watak negara waktu itu sedang berubah dari sebuah negara yang berdasarkan wilayah (kepemilikan tanah) menjadi sebuah negara yang berdasarkan pajak” (Hughes & Oats 2007, h. 76), dan negara melihat meningkatnya alat-alat pemerintahan yang memerlukan pendanaan lebih. Hughes dan Oats juga mengaitkan pergeseran kebijakan John setelah 1205 ke arah pemungutan-pemungutan yang lebih banyak, dengan kematian Hubert Walter, penasihat keuangannya yang moderat, pada tahun itu.

John menanggapi semua masalah pendapatan ini bukan dengan pajak-pajak baru, tetapi “mengeksplorasi pajak-pajak lama dengan taraf yang belum pernah ada sebelumnya”. Hughes dan Oats mengatakan, banyak pihak memandangi eksploitasi pajak-pajak lama ini sebagai perampasan dan mengamati bahwa pajak-pajak ini menciptakan suatu kekecewaan besar (Hughes & Oats 2007). “Pertolongan besar” di tahun 1207 merupakan bagian inti dari perluasan pajak-pajak lama ini (Carpenter 2015). “Pertolongan” dalam hal ini merujuk kepada suatu pajak umum atas kerajaan (Carpenter 2015), apa yang disebut Hughes dan Oats dengan sebuah “bantuan yang dermawan” (Hughes & Oats 2007, h. 94).

Pajak ini merintis fase baru karena dibebankan atas pendapatan (contohnya, penyewaan) dan benda-benda bergerak (utamanya jagung dan hewan-hewan pertanian) ketimbang tanah (Hughes & Oats 2007; Carpenter 2015). Pajak ini dikenal sebagai “pajak ketiga belas” dan saat itu senilai 12 *pence* (Hughes & Oats 2007). Dikecualikan dari beberapa kalangan pendeta, pajak ini diterapkan atas kebanyakan kelas dalam masyarakat (Hughes & Oats 2007). Sekumpulan bangsawan, mewakili komunitas para pembayar, menyetujuinya dengan protes (Hughes & Oats 2007) walaupun Carpenter menggambarkan klaim persetujuan oleh Raja John itu sebagai palsu (Carpenter 2015). Menurut Hughes dan Oats, pajak ini adalah contoh pergeseran pajak-pajak feodal menuju pajak nasional, yang

mencerminkan awal mula perkembangan negara pajak (*the tax state*) dan kebutuhan untuk mendanai negara tersebut, alih-alih mendanai penguasa (Hughes & Oats 2007).

Magna Carta lahir sebagai hasil para bangsawan yang kesal atas pemungutan pajak dan ingin membatasi kekuasaan Raja untuk memajak mereka. Namun ini bukan sekadar perang di antara kaum elite. Ini juga merupakan perang para elite melawan “bagian-bagian dari masyarakat” (Carpenter 2015, h. vii). Kota-kota, contohnya, sering kali memiliki kepentingan-kepentingan ekonomis yang berbeda dari pedesaan, dan di dalam keduanya ada pembagian-pembagian kelas yang jelas dan yang kurang jelas, antara mereka yang melakukan kerja dan mereka yang mengeksploitasi kerja tersebut. Dalam kata-kata Carpenter, “Magna Carta menunjukkan warga-warga Raja saling berseteru satu sama lain, sebagaimana mereka berseteru dengan Raja” (Carpenter 2015, h. vii). Linebaugh lebih jauh mengatakan bahwa Magna Carta merupakan sebuah kesepakatan tertulis di antara kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dalam sebuah perang saudara yang melibatkan tujuh konflik, termasuk antara rakyat biasa dan apa yang ia sebut dengan pemilik (*privatizers*), mereka yang akan menyingkirkan rakyat biasa dari tanah mereka (Linebaugh 2008). Tentunya, rakyat biasa tidaklah absen dari perjuangan untuk Magna Carta. Para bangsawan hanya dapat merebut London, dan karenanya memaksa Raja menandatangani Piagam di Runnymede dengan dukungan dari rakyat London. Seperti dikatakan Alexander (Alexander 2015a):

Pemberontakan pada 1215 ditentukan oleh dukungan dari warga kota dan rakyat London. Raja John akhirnya terpaksa berunding hanya ketika warga London menyerahkan kota kepada para pemberontak. Para bangsawan bergantung kepada sebuah dasar sosial dukungan yang luas untuk keabsahannya.

Peran rakyat, baik sebagai dukungan bagi “kebaikan” mereka sendiri serta sebagai pejuang untuk dunia yang lebih baik, adalah tema yang menggema di lorong-lorong sejarah pajak.

Lalu apa kemudian yang dimenangkan oleh para bangsawan? Mereka memenangkan (apa yang nantinya menjadi) aturan hukum, sedemikian sehingga sejak tahun 1300 semua bagian masyarakat melihat Magna Carta sebagai hal yang melindungi mereka melawan peraturan yang semena-mena (Carpenter 2015). Para bangsawan membatasi kekuasaan Raja untuk menarik pajak dari mereka dan yang lainnya. Klausula 12 melarang penarikan pajak militer dan bantuan, kecuali melibatkan penasihat umum kerajaan. Ada beberapa pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, seperti tebusan untuk mendapatkan kebebasan Raja. Klausula 14 mengatur mekanisme untuk membentuk penasihat umum tersebut – undangan-undangan perseorangan bagi eselon-eselon tingkat atas dari elite, lebih umumnya melalui *sherrif* (polisi wilayah) dan *bailiff* (juru sita) kepada para eselon dari elite yang lebih rendah. Mengutip Nicholas Vincent (Vincent 2015):

Klausula 39 dan 40, contohnya, melarang jual-beli kasus hukum dan menekankan keras proses hukum yang semestinya. Dari sini lahir tidak hanya prinsip *habeas corpus* (bahwa tersangka tidak boleh ditahan secara tak jelas tanpa persidangan), tetapi juga gagasan hak untuk mengajukan persidangan oleh juri (“teman-teman” tersangka). Bahkan penangguhan tuduhan berdasarkan praduga tak bersalah dapat dilacak kembali kepada apa yang tertera pada Magna Carta klausula 40. Dari klausula 14 tahun 1215, Magna Carta melahirkan gagasan mengenai tidak diperbolehkannya pemajakan tanpa badan perwakilan, dan dengan ini pula pendirian sebuah

penasihat umum, yang selayaknya tergabung ke dalam Parlemen, sebagai cara memperoleh persetujuan rakyat.

Di sini terdapat kunci ke Magna Carta beserta ambiguitasnya. Kandungan revolusioner Magna Carta tampaknya tidak berada dalam kekhususan kontekstualnya tetapi dalam keumuman ahistorisnya atau, seperti digambarkan Alexander, “jarak antara kenyataan asli dan makna yang menyertainya” (Alexander 2015). Pada 1215, penasihat umum berarti, seperti dibuat jelas oleh klausa 14, para pemilik lahan utama (*tenants-in-chief*), orang-orang yang mendapatkan tanah mereka langsung dari raja (Carpenter 2015). Dari tahun 1297, Edward I dipaksa menyetujui bahwa dia hanya dapat menarik pajak “berdasarkan persetujuan bersama dari semua kerajaan” (Carpenter 2015, p. 459). Dalam perjuangan merebut suara dalam masyarakat, pemberontakan-pemberontakan merujuk kembali ke Magna Carta untuk mendukung tuntutan-tuntutan mereka. Mereka melakukan hal ini bukan hanya dalam Pemberontakan Kaum Tani pada 1381 dan Perang Sipil Inggris, tetapi juga dalam Perang Kemerdekaan Amerika, perjuangan para *Chartists*³; gerakan hak pemilihan umum untuk perempuan (Carpenter 2015), perjuangan melawan *apartheid* (Mandela 1964), dan pemberontakan Zapatista (Linebaugh 2008). Konsep Magna Carta berubah dan semakin meluas seiring waktu, bersama dengan berubah dan berkembangnya masyarakat yang darinya ia berasal. Hari ini, contohnya, para libertarian-pasar-bebas-sayap-kanan dan para liberal juga menyatakan “kebenaran” Magna Carta. Chris Berg (2015) memetakan proses bagi universalisme liberal ini. Dia berkata, hal ini lahir:

[k]arena klausa-klausa Latin yang samar tersebut, di tangan para propagandis dan pasukan revolusioner selama puluhan dan ratusan tahun setelah Juni 1215, menjadi sebuah dokumen yang melambangkan batasan-batasan umum atas kekuasaan raja. Kesalahpahaman anakronistik atas Magna Carta sendiri merupakan suatu dorongan untuk kemajuan liberal (*liberal progress*). Karenanya, memperingati Magna Carta berarti pula memperingati 800 tahun sejarahnya, bukan aturan-aturan spesifik yang ia bebaskan, contohnya, laporan-laporan pendapatan suatu lahan pribadi ketika ia dalam perlindungan. Ini juga berarti merayakan, bagaimana persetujuan perdamaian yang aneh dan gagal ini mendirikan suatu hubungan tetap antara perlawanan pajak dan kebebasan politik dalam dunia penutur Inggris.

Dalam esensinya, Magna Carta membangun suatu “kaitan antara perpajakan dan persetujuan” (Madicott 2015, h. 22) yang kemudian menggema selama berabad-abad. Kita melihat, menurut Carpenter, “kemunculan negara parlementer berdasarkan-pajak” (Carpenter 2015, h. 459). Sementara para libertarian di masa berikutnya mungkin merayakan kaitan antara perpajakan dan badan perwakilan, mereka melakukannya berdasarkan sudut pandang para bangsawan daripada rakyat umum. Kelas-kelas berkuasa berikutnya mengambil slogan kebebasan untuk mengikat (rakyat) yang dieksploitasi. Linebaugh (2008, h. 192) misalnya, berkata bahwa “untuk satu waktu, dalam abad ke-20, perkembangan kultural Magna Carta mengarah kepada pemberhalaannya: ia berhenti menjadi sebuah dorongan konstitusional aktif dan menjadi sebuah simbol yang dicirikan oleh ambiguitas, misteri, dan omong kosong ... ia menjadi berhala kelas berkuasa”. Adalah ketika gagasan ini dan kemudian perwujudan dari perlawanan mencengkeram mereka yang tertindas dan yang tereksplorasi, maka muncul kemungkinan-kemungkinan demokrasi yang nyata, dan

³ Gerakan para pendukung reformasi politik yang terutama berasal dari kelas buruh (pekerja), di Inggris dari tahun 1838 sampai 1848, dengan dokumen politik mereka yang terkenal, “*People’s Charter*” (Piagam Rakyat), disebut juga “*National Charter*” (Piagam Nasional). – *Jurnal Sosialis*

karenanya suatu tantangan terhadap aturan para elite. Hubungan antara perjuangan dan kebebasan menjadi lebih jelas. Hubungan ini kerap diantarai oleh pajak dan perlawanan melawan pemaksaannya. Pajak dapat menjadi penyulut. Contohnya, perlawanan dan universalitas tersebut mengekspresikan dirinya dalam pemberontakan rakyat tahun 1381 yang dikenal sebagai Pemberontakan Kaum Tani.

III. Pemberontakan Kaum Tani 1381

Pemberontakan Kaum Tani merupakan sebuah cerminan – serta fenomena yang memperdalam krisis – masyarakat Abad Pertengahan di Inggris pada waktu itu (Hilton & Fagan, h. 13). Pertentangan kelas dan perseteruan antara tuan feodal dan budak merupakan penyebab utamanya (Hilton & Fagan 1950). Pajak pemilihan umum (*poll tax*), atau, tepatnya serangkaian pajak pemilihan umum, merupakan penyulutnya (Hilton & Fagan 1950).

Pada waktu itu, ada sejumlah hal yang menyumbang kekecewaan massal yang mengarah kepada pemberontakan. O'Brien melihat penyebab-penyebab jangka panjang pemberontakan sebagai “dorongan-dorongan pertentangan ekonomi, sosial dan ideologis yang kuat [yang] telah terkunci bersama...” (O'Brien 2004, p. 14). Dorongan-dorongan ini terus-menerus berubah dan pertentangan-pertentangan terus meninggi seiring tumbuhnya kota-kota dan berkembangnya perniagaan, beserta kemunculan sebuah kelas kapitalis yang baru lahir (O'Brien 2004). Meskipun begitu, O'Brien percaya bahwa mungkin diperlukan satu atau dua abad untuk pecah revolusi (O'Brien 2004). Namun, seperti yang ia katakan, “proses sejarah dipercepat ... oleh politik pada waktu itu dan tindakan-tindakan kelas yang berkuasa, serta oleh dorongan-dorongan dari alam” (O'Brien 2004, p. 13).

Musibah Maut Hitam di tahun 1348-1349 membunuh kira-kira sepertiga atau setengah penduduk (O'Brien 2004). Hal ini menyebabkan kelangkaan para pekerja (O'Brien 2004; Konicki 2012). Para budak (atau buruh tani) menjadi semakin banyak menuntut dan menerima upah bagi kerja mereka (O'Brien 2004). Mereka juga memiliki mobilitas lebih; seiring tuntutan kerja, mereka menyaksikan para pemilik tanah mengharapkan kehadiran mereka serta menaikkan gaji mereka (O'Brien 2004). Kelas-kelas orang kaya bersatu melawan naiknya upah kerja dan keyakinan untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi, yang diberikan kelas ini kepada kelas-kelas yang lebih rendah (O'Brien 2004). Perintah Raja di tahun 1349, kemudian Statuta Parlemen tentang Para Pekerja (*the Parliaments Statute of Labourers*) di tahun 1351 berusaha menjaga upah senilai tahun 1346, yakni, pada tingkat sebelum Maut Hitam (O'Brien 2004). Harga-harga melampaui gaji, untuk sementara (Konicki 2012). Namun, hal semacam ini adalah tuntutan kerja, bahwa seiring waktu gaji rata-rata naik (O'Brien 2004).

Tidak hanya Statuta Para Pekerja berupaya menentukan tingkat pembayaran untuk kerja tertentu dengan begitu rinci. Statuta ini juga memiliki klausa-klausa mengenai penyediaan tenaga kerja yang begitu ketat. Ia mewajibkan mereka, lelaki dan perempuan yang berbadan sehat di bawah usia 60, yang tidak bekerja dan tidak memiliki tanah atau majikan, untuk bekerja bagi siapa saja yang menginginkan mereka (Hilton & Fagan 1950). Setiap pelayan yang meninggalkan majikan mereka sebelum waktunya (misalnya untuk mencari posisi yang lebih baik) berisiko dipenjara selama dua tahun (Hilton & Fagan 1950).

Seperti dicatat O'Brien (O'Brien 2004, h. 20):

Upaya berkali-kali untuk memaksakan [Stauta Para Pekerja], bagaimanapun berarti bahwa ia tidak hanya menjadi suatu bagian perundang-undangan yang dibenci, tetapi juga merupakan benih bagi suatu perjuangan kelas dengan jenis baru. Sebelumnya, para petani telah berjuang melawan tuan tanah tertentu yang menindas mereka. Sekarang, permusuhan mereka tujukan secara lebih besar kepada Parlemen dan institusi-institusi nasional lainnya. Politisasi yang dimungkinkannya kemudian menjadi massif, menjadi sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar atas masyarakat.

Perang juga memainkan peran yang penting dalam pemberontakan. Perang Seratus Tahun telah menghabiskan lumbung-lumbung kekayaan (Konicki 2012). Di tahun 1377, contohnya, Prancis telah menduduki pantai selatan dan menempati Isle of Wight, serta menaklukkan Rye, Lewes, Folkstone, dan Portsmouth (Simkin 2014). Para bangsawan dibebani pajak untuk mendanai perang (Simkin 2014). Untuk melepaskan beban mereka serta mengurangi ketakutan atas wajibnya mereka menghabiskan uang mereka ke dalam jurang anggaran militer yang tak berdasar, pajak pemilihan umum diterapkan kepada “warga kota dan desa yang miskin” (Hilton & Fagan 1950, h. 49), tak hanya para tuan tanah. Ada tiga pajak pemilihan umum – 1377, 1379, dan 1381. Ketiganya diadakan untuk mendanai ekspedisi-ekspedisi di Prancis (Simkin 2014). Masing-masing menjadi semakin membebani. Tinggi pajak pada 1371 adalah 4 *pence* per orang, tingkat pada 1379 ditentukan seberapa kaya orang tersebut dan pada 1381 menjadi 12 *pence* per orang (Simkin 2014). Pemaksaan pajak ini di musim semi 1381 untuk membayar peperangan yang menghabiskan banyak nyawa dan uang (Ormrod 1990) merupakan “penyebab langsung pemberontakan” (Hilton & Fagan 1950, h. 1).

Tanggapan pertama para petani terhadap naiknya harga pajak pemilihan umum di tahun 1381 adalah menolak besar-besaran untuk membayarnya (O’Brien 2004). Pajak pemilihan umum diambil dari setiap orang; untuk menghindarinya, para petani “menghilang”. Jumlah populasi, yang didorong oleh keperluan untuk menghindari pajak, tampak turun dari 1.355.201 pada 1377 menjadi 896.481 pada 1381” (O’Brien 2004, pp. 30-31).

Negara menanggapi dengan memberikan kekuatan ekstra kepada para penyidik, penilai, dan pengumpul pajak. Januari dan Februari 1381, rakyat di seluruh Inggris, termasuk pejabat-pejabat lokal, memalsukan daftar para penghuni di desa mereka, kota-kota, serta daerah-daerah lainnya (Lindsay & Groves 1974). Di Mei 1381, ketika Komisioner Pajak di Brentwood berupaya membuat para penduduk desa membayar, sering kedua kalinya, untuk menutupi pajak-pajak yang tak dibayar warga lain, para warga bangkit dan mengusirnya serta teman-temannya (Lindsay & Groves 1974; O’Brien 2004; Hume 1826; Foot 1981).

Seperti dicatat Lindsay dan Groves, “perlawanan telah dimulai” (Lindsay & Groves 1974, h. 78). Warga lainnya melakukan hal yang sama, membunuh beberapa komisioner atau mereka yang membantunya (Lindsay & Groves 1974). Dengan segera dua kelompok petani terpisah, mungkin masing-masingnya sampai sebanyak 70.000, (O’Brien 2004), mulai berkumpul dari Exeter dan Kent, kemudian membesar sampai ke seluruh negeri, dan dengan dukungan dari rakyat London (Lindsay & Groves 1974) mengambil alih kota.

Ini adalah pemberontakan rapi (Foot 1981) yang dibangun selama 20 tahun pidato dan diskusi, serta dipicu oleh kekecewaan kelas para petani dan warga kota (Foot 1981; O’Brien 2004). Seperti O’Brien nyatakan, pemberontakan ialah hasil dari, satu di antara hal-hal

lainnya, “kerja yang sabar dari para pejuang revolusioner” (O’Brien 2004, h. 27). Termasuk pula gagasan bahwa rakyat tak seharusnya membayar pajak yang tak adil.

Pajak ini memang tak adil. Seperti dikatakan Dobson, tak hanya “kebuasan dari perpajakan nasional pada tahun-tahun sebelum 1381, tetapi juga penderitaanlah yang dibebankan oleh eksploitasi pemerintah atas komunitas-komunitas lokal abad ke-14” (Dobson 1993, h. xxxv) yang merupakan penyebab besar pemberontakan 1381. Dan kembali ke tema yang akan dibahas kembali, pajak tidaklah merakyat karena ia tidak bisa disetarakan. Menurut Lindsay dan Groves, “Para tuan dan para warga yang berbeda-beda,” seperti direkam dalam catatan *Kronik Anonimallae*, “berpikir bahwa pajak secara lalim ditarik dari yang miskin, bukan dari yang kaya, dan dalam kasus tertentu para pengumpul pajak menyimpan hampir semua hasil pungutan tersebut” (Lindsay & Groves 1974, h. 76).

Paham kesetaraan esensial para petani, yang disebut David Hume (Hume 1826, p. 6) sebagai “gagasan mengenai kesetaraan primitif ... terpatri dalam hati semua manusia”, tampak begitu jelas dalam pidato penceramah radikal dan salah satu pemimpin pemberontakan, John Ball, seorang lelaki yang mengajarkan bentuk kekayaan bersama selama bertahun-tahun, dan dipenjara akibat hal itu serta berbagai macam tuduhan bid’ah keagamaan (Lindsay & Groves 1974). Pemberontakan membebaskannya dari penjara. Dalam pidato pelepasannya ia berkata (Trevelyan 1915, h. 197):

Sahabat-sahabatku yang baik, hal-hal tak dapat berjalan baik di Inggris, dan tak akan pernah, sampai segalanya berada dalam persamaan; ketika tak ada budak dan majikan dan ketika semua perbedaan diangkat, ketika para majikan tak lagi menjadi tuan atas diri kita. Betapa menyakitkan mereka memanfaatkan kita? Dan apa alasan mereka mengurung kita dalam ikatan? Bukankah kita dilahirkan dari orang tua yang sama, Adam dan Hawa? Dan apa yang dapat mereka tunjukkan, alasan yang dapat mereka berikan, mengapa mereka lebih menguasai kita daripada diri kita sendiri? Kecuali mungkin untuk membuat kita menjadi pekerja dan bekerja untuk mereka. Mereka berbusana sutera dan benda-benda mahal, dihias lencana dan jubah kulit, sementara kita terpaksa memakai pakaian compang-camping. Mereka memiliki kursi-kursi dan rumah-rumah yang menawan, di saat kita harus melawan angin dan hujan dalam pekerjaan kita di ladang; tetapi dari kerja kita yang dimiliki merekalah, mereka mendapatkan kemewahannya, kita disebut budak, dan jika kita tidak melayani mereka kita dipukul.

Sebagai contoh dari gagasan-gagasan kesetaraan primitif ini ialah bahwa tuntutan-tuntutan para pemberontak tak hanya mencakup penghapusan pajak pemilihan dan upah yang lebih baik, tetapi tuntutan mengakhiri perbudakan, potongan uang sewa, penghentian aristokrasi, dan lebih-lebih kependetaan, dan bahkan beberapa bentuk demokrasi atau pemerintahan-diri (Eisenman 2005). Di sini terletak tuntutan akan perubahan sosial yang mendasar, suatu revolusi sosial, tanpa mengetahui bagaimana ia bisa dimenangkan. Bahkan sekalipun terdapat pemahaman mengenai kekuatan massa kaum yang tak-bebas, mereka yang bekerja tanpa upah untuk majikan (Carpenter 2016), pemahaman ini saja tidaklah cukup untuk menumbangkan feodalisme. Mereka mungkin telah memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah feodalisme secara mendasar, meskipun pada waktu itu bahkan pembicaraan mengenai apakah posisi sosial massa yang tak-bebas memberikan kekuatan tersebut, merupakan satu poin yang tak relevan. Dalam setiap peristiwa, gagasan-gagasan mereka tidak memungkinkan mereka untuk mewujudkan menjadi sejenis tingkatan-tingkatan sosial dalam feodalisme. Seperti dikatakan Harman, kelas petani tak terdidik dan hanya tertarik kepada desa dan tanah mereka (Harman 2008, h. 155). Mereka tidak dapat

mengorganisasi diri dan bersatu dengan sebuah visi mengenai suatu masyarakat baru dan mewujudkannya (Harman 2008). Tentu saja, hubungan modal dan tenaga kerja belum berkembang dalam satu arah kapitalisme yang memadai, untuk melihat suatu kelas kapitalisme yang cukup besar dan kelas menengah darinya, untuk menantang feodalisme, atau bahkan perwakilan-perwakilan tertentu dari sistem, khususnya Raja (Richard II).

Sebaliknya, para pejuang revolusi malah menyatakan kesetiaannya kepada Raja, dan kepada rakyat biasa. Ini adalah kekalahan mereka. Mempertimbangkan adanya perlawanan yang begitu besar, Raja menyetujui semua tuntutan dari massa tak-bebas dalam rangka mengulur waktu demi mempersiapkan kekuatannya sendiri. Setelah pemimpin yang terpilih, Wat Tyler, dibunuh pada satu pertemuan yang ia hadiri sendiri beserta Raja dan para pendukungnya, dengan kata lain, suatu jebakan (Lindsay & Grove 1974) – Raja, atas dasar kesediaan memenuhi tuntutan-tuntutan, bergabung dengan penderitaan para petani, meyakinkan puluhan ribu dari mereka yang dikumpulkan dari daerah terdekat untuk kembali ke tanah mereka dan melanjutkan panen. Mereka melakukannya. Pemberontakan padam, dan dalam hitungan hari, Raja telah mengumpulkan seribu pasukan dan menghancurkan perjanjian damai. Satu periode reaksi menyusul, dan para pemimpin pemberontakan serta banyak pengikutnya dibunuh (Lindsay & Grope 1974).

Apakah pemberontakan tersebut merupakan sebuah kegagalan? Tidak sama sekali. Ia benar-benar memenangkan keuntungan bagi kaum-kaum tak bebas dari waktu ke waktu. Paul Foot menjelaskan (Foot 1981):

Pada 1382, sebuah pajak pemilihan diberlakukan parlemen John dari Gaunt, tetapi kali ini bagi *para tuan tanah saja*. Pada 1390, upaya untuk merendahkan gaji dihapuskan secara formal, serta sebagai akibatnya, Statuta Para Pekerja dibatalkan. Mulai tahun 1430, hanya 50 tahun setelah Pemberontakan Para Petani, ikatan dan perbudakan dihancurkan di Inggris, sebelum negara-negara lainnya di Eropa.

Kaum tertindas telah bangkit melawan penindas-penindas mereka, disulut oleh pajak yang tidak adil. Pencarian mereka akan kesetaraan di dalam sebuah masyarakat yang ketidaksetaraannya begitu mendalam mendorong mereka. Mereka tidak memiliki pemahaman politik maupun posisi sosial untuk menumbangkan feodalisme, atau bahkan untuk memaksakan kehendak mereka kepada Raja dan seluruh kelas yang berkuasa (Harman 2008). Namun, Pemberontakan Kaum Tani merupakan sebuah revolusi politik dari bawah yang memprakarsai suatu proses jangka panjang untuk mengubah feodalisme dari dalam, yang menguntungkan bagi para petani, serta mempercepat perkembangan kapitalisme dalam ratusan tahun berikutnya di Inggris. Pada saat Revolusi Inggris, kapitalisme sedang dan telah membuat jalan bagi dirinya ke seluruh dunia. Seperti dikatakan Mandel (Mandel 1980):

Pertarungan kelas borjuis yang sedang naik untuk memaksimalkan akumulasi kapital, atau lebih-lebih, menghilangkan semua rintangan bagi perkembangan bebasnya, pada awalnya adalah sebuah perjuangan melawan kekuatan tak terbatas dari negara pra-kapitalis untuk memungut pajak. Karenanya, sejatinya, pertarungannya untuk merebut kekuasaan politik, pada dasarnya adalah kekuasaan untuk menentukan bagi dirinya bagian mana dari nilai-lebih yang akan ditarik melalui perpajakan dari pengumpulan modal langsung oleh “para kapitalis yang berfungsi”, yaitu secara objektif dibebaskan (*socialized*). Hal ini tidak bisa disangkal, dan tidak bisa diabaikan sebagai “rincian empiris semata”, bahwa semua revolusi borjuis antara abad ke-16 dan ke-19 disulut oleh perlawanan atas pajak, dan bahwa seluruh parlemen modern muncul dari pertarungan borjuis untuk mengendalikan pengeluaran negara. Bentuk-bentuk

organisasional spesifik kekuasaan politik borjuis, dengan kerapian rumit struktur politik informalnya (partai-partai, klub-klub, kelompok-kelompok tekanan, jaringan-jaringan dan lobi-lobi), kerjasama-kerjasama perdagangan yang mewakili kepentingan-kepentingan berbeda dalam perdebatan ekonomis (yang pertama-tama dan utamanya, jika bukan satu-satunya, merupakan perdebatan masalah pajak), pemilihan-pemilihan dan parlemen-parlemen terpilih, begitu juga sebuah aparat administratif permanen dan suatu ideologi negara yang sesuai (termasuk ajaran mengenai “pemisahan kekuasaan”), secara luas dapat direduksi kepada konflik dasar ini.

Adalah Revolusi Inggris dan Prancis (dan lainnya yang tersebar di Eropa dan di mana saja) yang menghilangkan keadaan feodal di negeri-negeri ini, dan menyediakan syarat-syarat bagi perluasan kapitalisme secara nasional dan internasional. Ini terjadi melalui pertarungan saudara (*hostile brothers*) untuk mendirikan institusi-institusi demokratis bagi penyelesaian atas perbedaan-perbedaan mereka. Demokrasi, bagaimanapun, merupakan harapan dan juga perjuangan dari kaum-kaum tak bebas. Karenanya, pemberontakan-pemberontakan di Inggris dan rakyat-rakyat lainnya untuk kebebasan menengok kembali dan mengambil inspirasi, baik dari Magna Carta dan dari Pemberontakan Kaum Tani pada 1381. Hal ini tentunya benar bagi Perang Sipil di Inggris.

IV. Perang Sipil Inggris, 1640-1660

Sekarang, cerita ini mungkin terdengar akrab. Keuangan negara sedang mengalami beberapa masalah; perang sedang berkejolak; dan raja serta sebuah Parlemen dari “kelas-kelas bertanah dan para pedagang” (Hill 1966, h. 29) dan “utamanya kaum terkuat (*gentry*) dan pedagang kaya” (Hill 1966, h. 39) terkunci dalam perselisihan, antara apakah Raja dapat menarik pajak tanpa persetujuan mereka yang telah terpilih (Bennett 1998). Di atas semua itu, perbedaan keagamaan, persekusi, dan tekanan menambah kekecewaan yang ada, dan, di antara berbagai hal, menyumbang perang dengan Skotlandia dan di Irlandia (Bennet 1998).

Penyebab-penyebab sistemik dan ekonomis yang lebih dalam dari Perang Sipil rumit. Hill menyematkannya pada perubahan watak dari ekonomi, khususnya naiknya para petani kapitalis seiring dengan borjuis kota (Hill 1966). Kerjasama keduanya mengambil alih negara, dan dengan membantu menyapu kekangan-kekangan feodal bagi perkembangannya, membuat perluasan kapitalisme di Inggris menjadi mungkin (Hill 1966). “Suatu hal niscaya,” kata Hill (1966, h. 9) “bagi perkembangan lebih jauh kapitalisme, bahwa parasitisme yang mencekik ini harus diakhiri dengan menumbangkan keadaan feodal”. Adalah kelas menengah mereka, borjuis yang sedang berkembang, atau yang ingin menjadi borjuis, dengan bantuan dari mereka yang tertindas, sering diwakili oleh “kaum kiri” (Manning, 1999, h. 1) yang memungkinkan suatu transisi panjang, suatu revolusi sosial, dari feodalisme ke kapitalisme di Kerajaan Inggris.

Kini, sebagaimana ditunjukkan oleh Manning, adalah suatu kesalahan memisahkan revolusi politik dari revolusi sosial, karena revolusi politik berakar dalam kekuatan-kekuatan sosial (Manning 1999). Pada waktu itu, benar-benar ada dua revolusi. Seperti diungkapkan Ellen Meiksins Wood (Wood 2001):

Ada satu revolusi yang diperbincangkan para sejarawan, di mana monarki, untuk suatu waktu, ditumbangkan dan yang pada gilirannya menguatkan kemenangan Parlemen, dalam Revolusi Besar 1688 yang masyhur.

Kemudian waktu itu ada revolusi lainnya, perjuangan kelas nyata yang berlangsung di dalam Revolusi tahun 1640-an, antara kelas pemilik dan massa kecil kelas produsen, para petani, para perajin, dan para pekerja.

Revolusi kedua tersebut menciptakan suatu adukan gagasan-gagasan serta tindakan-tindakan radikal yang belum pernah ada sebelumnya. Letusan dramatis dari radikalisme rakyat juga merupakan sebuah faktor besar dalam menyatukan kelas pemilik melawan revolusi kedua dan berada di balik restorasi monarki. Dengan kata lain, ini merupakan suatu perjuangan kelas yang otentik.

Pada akhirnya, mereka yang menginginkan kompromi dengan rezim lama menang, dan mereka yang menginginkan penumbangan permanen atas monarki dan aristokrasi, apalagi sebuah masyarakat baru yang setara dan demokratis, kalah (Manning 1999). Namun kemenangan tersebut, kemenangan politik tersebut, mengandung di dalamnya revolusi sosial. Pendirian kembali (monarki dan aristokrasi ini), berlawanan dengan pandangan Perry Anderson mengenai suatu revolusi yang tak lengkap (Anderson, 1964; Anderson 1992), benar-benar menyapu hambatan nyata bagi perluasan kelompok kapitalis di Inggris, sekalipun restorasi tahun 1660 melihat kepala pemerintahan kerajaan, dan umumnya hari ini tinggal nama, dihidupkan kembali. Revolusi Inggris memindahkan kekuasaan dari monarki dan aristokrasi kepada modal, sehingga dalam Revolusi Agung (*the Glorious Revolution*) tahun 1688 monarki Protestan yang baru didirikan (Charles II dan Parlemen) tidak memiliki kekuatan yang bernilai, sementara kaum borjuis melalui Parlemen mereka waktu itu memegang kendali atas negara (Wood 2003). Tentu saja kondisinya sedang cair, tetapi Parlemen kelas menengah sedang naik daun, dan pada abad berikutnya berhasil mengonsolidasikan kekuatan mereka seiring tumbuh dan meluasnya kaum borjuis, mengatasi monarki dan bekas-bekas nyata terakhir aturan feodal. Kondisi ini melahirkan adukan gagasan-gagasan dan praktik-praktik radikal yang hari ini dapat kita telusuri kembali. Ia melahirkan gagasan-gagasan mengenai revolusi sosial, jika bukan perwujudannya.

Siapakah kemudian yang merupakan kelas menengah yang memainkan peran terpenting itu dalam Revolusi Inggris? Brian Manning tidak tegas mengenai unsur-unsur apa yang membentuk kelas tengah atau kelas menengah, untuk alasan yang baik. Seperti ia katakan (Manning 1996, h. 10-11):

Istilah 'kelas menengah', bagaimanapun, tidaklah jelas ... Seorang borjuis yang sedang dalam proses pembentukan dan kemunculan istilah 'kelas menengah' menjelaskannya, tetapi tanpa menceraikannya dari kelompok umum para pemilik properti kecil ...

Dalam konteks kelenturan serta berubahnya relasi-relasi sosial ini, Mark O'Brien menawarkan kita satu pandangan mengenai parameter-parameter dari kelompok yang sedang berkembang ini. Ia berkata (O'Brien 1996):

Ketidakjelasan definisi "kelas menengah" merupakan sebuah fungsi historis yang niscaya dari kenyataan sosial waktu itu. Kenaikan (jumlah) perdagangan dan transaksi telah mengarah kepada kemunculan dari sebuah kelas dagang proto-kapitalis, dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari para tuan tanah Katolik yang dominan. "Kelas menengah", kemudian dimulai dengan lapisan-lapisan atas dari kelas petani yang wawasannya terpaku pada perluasan terus-menerus pasar London. Bersama dengannya adalah para pedagang dan para monopolis yang sekarang tercerabut dari produksi langsung barang-barang, dan yang menginginkan kendali atas pusat-pusat kota dan rute-rute perdagangan. Ada pula yang

bangkit melalui hierarki sosial, mereka adalah para pedagang yang dunianya melingkupi pasar-pasar dan kekuatannya melampaui garis pantai Britania dan yang kesetiaan domestiknya ambivalen sekaligus pragmatis. Terakhir, ada kaum bangsawan dari lapisan yang lebih rendah, yang jalinan hubungannya dengan aristokrasi lama melemah dan dari waktu ke waktu semakin erat bekerjasama dengan lapisan kelas pedagang yang sedang naik.

Tetapi, seperti yang akan kita lihat, bukan hanya kelas menengah yang mendorong Revolusi Inggris. Mereka yang tertindas – para petani, para pekerja upahan, para seniman, mereka yang pekerjaannya menyediakan kekayaan ekonomi kepada yang lainnya seperti majikan atau penyedia kerja – memainkan peran kunci dalam Perang Sipil dan peralihan menuju kapitalisme, yang sebagian disulut oleh pajak. Benar memang bahwa penyebab langsung Perang Sipil melibatkan, antara lain, perang dan pajak. Hill kembali menyatakan (Hill 1966, h. 30):

Simpul permasalahan terpenting adalah keuangan, yang karena hal ini telah terjadi konflik di akhir kekuasaan Elizabeth. Harga-harga meninggi, kekayaan kaum borjuis naik secara signifikan, tetapi pendapatan Mahkota (*the Crown*), seperti semua pemilik tanah yang besar, tetap mandeg dan tak cukup bagi kebutuhan-kebutuhan baru. Kecuali jika Mahkota dapat menggali kekayaan baru, entah dengan (a) menaikkan perpajakan secara drastis dengan mengorbankan kaum borjuis dan kaum bangsawan, atau (b) dengan sedemikian rupa ikut andil dalam proses produksi itu sendiri, (dengan syarat) kekuasaan independennya menghilang.

Kebijakan pertama – kenaikan tarif, pinjaman paksa, pajak baru – menggiring perkelahian sengit dengan Parlemen, yang telah lama menyatakan hak untuk mengendalikan perpajakan, dan tak akan pernah membiarkan pajak naik kecuali ia diberikan kendali penuh atas pengaturan Negara.

Hubungan antara perpajakan dan sebuah suara dalam negara yang membebaskan pajak itu, ditambah kapitalisme yang berkembang di dalam feodalisme sendiri, merupakan salah satu alasan mengapa Schumpeter menggambarkan perkembangan masyarakat selama seribu tahun terakhir sebagai gerak menuju “negara pajak” (Schumpeter 1991, h. 101), suatu keadaan yang mencapai puncaknya di bawah kapitalisme industri (Schumpeter 1991). Pandangan ini salah memahami watak kapitalisme dan peran negara dalam membatasi, atau mengembangkan, dan kemudian melindungi pengambilan nilai-lebih dari para pekerja. Pajak hanyalah satu contoh rumit dari perkembangan negara sebagai tangan kanan eksploitasi kaum kapitalis. Suatu gagasan Marxis yang meyakini, bahwa nilai-lebih yang diciptakan pekerja merupakan mesin kapitalisme, dan menyediakan profit-profit, bunga-bunga, rente-rente, dividen-dividen, upah-upah, juga pajak-pajak (Passant 2015, h. 264). Contohnya, Poulantzas berpendapat: “[P]engamatan kita harus mengambil petunjuk dari kecenderungan turunnya tingkat profit. Campur tangan negara dalam ekonomi harus secara esensial dipahami sebagai hadirnya upaya untuk melawan kecenderungan ini...” (Poulantzas 1978, h. 173). Dengan petunjuk ini, dan dalam iklim hari ini mengenai “reformasi” pajak, peran negara dalam hubungannya dengan pajak ialah mereduksi pajak menjadi bisnis. Alasannya cukup sederhana. Marx berkata (Marx 1977, h. 751):

... kejatuhan tingkat profit dapat ditunda lebih lama dengan mengabaikan pengurangan-pengurangan dari keuntungan yang ada, yaitu dengan menurunkan pajak, mengurangi sewa tanah, dan sebagainya ... karena hal-hal ini sendiri adalah bagian-bagian dari profit dengan nama lain, dan yang diambil oleh orang-orang selain para kapitalis sendiri.

Dave Eden, dalam mendiskusikan peran negara dalam reproduksi sosial, menerapkan logika ini dengan cara yang bernuansa dialektis. Dia berkata (Eden 2015):

Bagi negara, pertanyaannya adalah selalu bagaimana untuk mendanai reproduksi sosial dengan cara yang meminimalisir efek dari akumulasi kapital. Negara sendiri bergantung, agar ia berfungsi, kepada akumulasi kapital. Ini tidak sekadar merupakan akibat suatu ideologi neoliberal, tetapi ini merupakan suatu kenyataan material.

Karenanya, perhatian negara adalah membentuk kebijakan dengan cara yang merangsang akumulasi kapital. Dan jika akumulasi kapital itu didorong oleh penanaman investasi dari firma-firma yang berupaya membuat keuntungan, kebijakan pajak harus dibentuk dengan cara yang menjamin atau menaikkan kemungkinan keuntungan. Dorongan utama dari diskusi reformasi pajak hari ini adalah tentang memindahkan lebih banyak beban pajak dari modal kepada tenaga kerja, khususnya dengan menaikkan konsumsi pajak dalam bentuk PPN (Pajak Penambahan Nilai) sambil memotong pajak-pajak korporasi. Hal inilah yang senantiasa dilakukan oleh berbagai kelompok yang mendukung modal.

Ini adalah argumen-argumen untuk masa depan, tetapi terinspirasi oleh perkembangan dalam Perang Sipil Inggris, revolusi pertama melawan feodalisme dan secara objektif mendukung kapitalisme. Pandangan saya sendiri, mengikuti Neil Davidson, adalah bahwa hasil dari revolusi-revolusi Inggris, Amerika dan Prancis adalah petunjuk penting tentang watak revolusi-revolusi ini, dan kita dapat menyebut revolusi-revolusi ini borjuis (Davidson 2012; Davidson 2015).

Mari kembali ke Revolusi Inggris. Dalam periode sebelum Perang Sipil Inggris, suara Raja bergema lebih keras daripada siapapun dari setiap rakyatnya yang kuat. Antara 1629 dan 1640, Charles I berkuasa tanpa dukungan atau pembatasan parlemen – Tirani Sebelas Tahun, seperti para penentangannya menyebutnya (Bennett 1998). Pada dasarnya, dia mengepung Parlemen – Hill (Hill 1966, h. 35) menyebutnya sebuah kudeta – dan memenjarakan beberapa pemimpinnya dan mencegah Parlemen untuk duduk menjabat. Untuk bertahan, Raja mengandalkan pajak-pajak tradisional, seperti kewajiban uang setoran yang dikenal sebagai setoran *tonnage* (tarif berdasarkan ton) dan *poundage* (tarif berdasarkan pon). Namun pada 1625 Parlemen memberikan Charles I kesempatan untuk membebaskan kewajiban seperti itu dengan persetujuan tahunan Parlemen. Ini salah satu alasan mengapa Raja menolak untuk membiarkan Parlemen duduk menjabat selama 11 tahun. Untuk mengumpulkan pajak-pajak ini, Charles I mengembangkan seperangkat unit petani suruhan (*customs farmers*) yang dituntut untuk menaikkan pajak untuk satu wilayah tertentu, lalu diberi mandat untuk mengumpulkannya, ditambah persentase bagi mereka sendiri (Quintrell 1993).

Peran lain negara kapitalis dapat digambarkan dengan sangat baik sebagai peran yang memberi kepastian bahwa reproduksi sosial sistem itu terjadi, dan itu berarti, antara lain, tak hanya bahwa modal dapat terus mengeksploitasi para pekerja tanpa halangan, tetapi juga bahwa terdapat kelas pekerja yang berpendidikan dan sehat yang cocok untuk dieksploitasi. Tentu saja, terus berlanjut kontradiksi antara tekanan-tekanan langsung akibat turunnya tingkat keuntungan terhadap potongan pajak atas modal, dan kontribusi modal terhadap pajak untuk membayar kesejahteraan sosial.

Tetapi saya terlalu jauh dari tujuan saya sendiri. Kembali ke perjuangan kelas di Inggris pada abad 17 dan krisis pendapatan yang dihadapi Raja. Untuk meningkatkan

pendapatan, Charles I juga menggunakan *purveyance*, yaitu “hak perintah Raja untuk membuat persediaan dan pengangkutan kebutuhan rumah tangganya di bawah harga pasar” (Aylmer 1957, h.81). Dalam suatu masyarakat di mana relasi-relasi pasar serta pertukaran nilai kian berubah menjadi norma, atau setidaknya memiliki kemungkinan untuk itu, cara menaikkan pendapatan semacam ini melemahkan transaksi bebas dan kompetitif. Dalam suatu metode penerapan, *purveyance* ini berkembang menjadi suatu pajak yang dikenal sebagai Komposisi (Aylmer 1957). Komposisi adalah perbedaan antara harga Raja dan harga pasar yang diterapkan kepada barang-barang dan jasa-jasa berdasarkan satu wilayah khusus untuk Raja (Aylmer 1957). Perbedaan tersebut pada dasarnya merupakan suatu pajak yang dikumpulkan dari para warga.

Penjualan monopoli, cara lain yang digunakan Charles I untuk menaikkan pendapatan, juga melemahkan pasar dan persaingan. Raja memberikan paten-paten kepada individu-individu dan korporasi-korporasi serta memberi mereka “hak untuk berniaga secara eksklusif dalam barang berjumlah banyak. Untuk keistimewaan itu, mereka yang diuntungkan membayar” (Belloc 2001, h. 139). Suatu pajak yang lebih terkesan dibuat-buat, dan tidak memberi dampak kepada pasar, adalah penyitaan keprajuritan. Pada dasarnya, pajak ini melibatkan pemberian penalti terhadap orang-orang yang memiliki lebih dari 40£ dari tanah yang diberikan, jika mereka tidak menghadiri upacara pelantikan dan diangkat sebagai prajurit (Leonard 1978)

Charles I juga menghidupkan kembali Upeti Kapal dan kemudian memperluas basisnya. Upeti Kapal merupakan sebuah hak tradisional bagi raja-raja untuk menuntut kapal-kapal dan orang-orang dari kota-kota pelabuhan untuk mempertahankan negara atau, seiring berjalannya waktu, menyediakan uang sebagai gantinya (Keir 1936). Hal ini terus-menerus berlanjut diterapkan secara tidak teratur tanpa persetujuan Parlemen pada tahun-tahun setelah Magna Carta, meskipun terdapat pernyataan dari dokumen tersebut mengenai larangan pajak tanpa persetujuan, yaitu – efektifnya – suatu dukungan parlemeter.

Charles I ketika itu sedang mengalami kesulitan untuk menaikkan pendapatan, sehingga pada 1634 dia mengadakan dan menerapkan kembali Upeti Kapal untuk wilayah-wilayah pantai untuk mendanai Angkatan Laut (Quintrell 1993). Upeti Kapal tidak masuk ke Bendahara Kerajaan. Ia masuk ke Angkatan Laut (Keir 1936). Namun ini mengumpulkan uang pendapatan. Hal ini tampaknya jelas memiliki akibat menguntungkan bagi pendapatan, membantu mempersenjatai negara bangsa melawan musuh masa depan, atau, seperti dinyatakan Andrews, “hal ini memungkinkan Mahkota untuk memiliki kebijakan luar negeri yang meyakinkan tanpa harus merugikan diri sendiri” (Andrews 1991). Dalih langsung yang diberikan untuk Upeti Kapal adalah ancaman pembajakan, atau terkadang pendapat yang lebih umum mengenai perlunya melindungi wilayah (Andrews 1991). Mungkin saja bagi mereka yang memiliki gagasan untuk mengadakannya, Upeti ini akan menjadi, “seperti dinyatakan Clarendon, “suatu persediaan yang tidak akan habis untuk setiap waktu” (Andrews 1991, h. 138). Charles berpendapat, bukan tanpa alasan masuk akal, bahwa seluruh wilayah diuntungkan dengan perlindungan Angkatan Laut, dan karenanya pada 1635 dia memperluas Upeti Kapal dari wilayah-wilayah pantai ke seluruh Inggris (Hill, 2002). Tidak seperti pajak lainnya yang hanya diperuntukkan bagi orang kaya dan berkuasa, Upeti Kapal diterapkan kepada semuanya (Lindley 1973), tetapi dalam kenyataannya hanya dapat dibayar oleh mereka yang memiliki aset-aset, baik pribadi maupun riil (Hill 2002). Karenanya ia

mencakup kelas menengah, para pedagang, dan para produsen skala kecil di kota-kota, yang beberapa di antaranya sedang dalam proses menjadi borjuasi.

Kepentingan pajak, sebagaimana dicatat Hill, adalah politis (Hill 2002). Seperti dikatakannya (Hill 2002, h. 55): “Jika [Upeti] ini dapat diberlakukan sebagai pajak reguler di mana Raja diberi hak untuk mengumpulkannya tanpa persetujuan parlemen, maka keputusan konstitusional mendasar dari abad ini akan diputuskan mengikuti kepentingan monarki”. Dalam soal Upeti Kapal tahun 1637 yang terkenal, Pengadilan Bendahara Kerajaan (*Court of Exchequer Chamber*) telah memutuskan dengan pertimbangan picik, bahwa Raja dapat menarik pajak setelah John Hampden yang kaya menolak membayarnya (Hill 2002). Kepatuhan terhadap pajak pada mulanya sangat tinggi, mencapai hampir 97 persen pajak yang ditetapkan (Hill 2002). Pada 1638 jumlah tersebut menjadi tidak dibayar sebanyak 61 persen, sebagian sebagai tanggapan atas kasus Hampden yang disidangkan dan meletusnya Perang Skotlandia, dan beban pajak yang ditimpakan bagi kelas menengah (Hill 2002). Marx menulis mengenai penolakan Hampden untuk membayar Upeti Kapal, mengawali serangkaian kejadian yang mengarah kepada eksekusi Charles I. Dia berkata (Marx 1849):

Bukanlah John Hampden ... yang membawa Charles ke tiang gantungan, tetapi kekeraskepalaan yang terakhir semata-mata, ketergantungannya kepada kepemilikan *estate-estate* feodal, dan upayanya yang sombong untuk menggunakan paksaan dalam menekan tuntutan-tuntutan darurat dari masyarakat yang sedang muncul. Penolakan untuk membayar pajak hanyalah suatu tanda perselisihan yang berlangsung di antara Mahkota dan rakyat, semata-mata bukti bahwa konflik antara pemerintahan dan rakyat telah mencapai suatu tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Penolakan ini bukanlah penyebab ketidakepatuhan atau perseteraan, ini hanyalah sebuah ekspresi dari fakta ini. Yang paling buruk, ini menggiring kepada tumbangannya pemerintahan yang sedang berjalan, sistem politik yang sedang berjalan. Dasar-dasar masyarakat tidak terkena dampak penolakan ini. Dalam kasus ini, terlebih-lebih, penolakan untuk membayar pajak merupakan suatu sarana pertahanan-diri masyarakat melawan sebuah pemerintahan yang mengancam dasar-dasarnya.

Perselisihan pajak merupakan bukti dari perselisihan-perselisihan atau krisis-krisis sosial yang lebih luas, diperantarai melalui negara di bawah kapitalisme atau melalui para penguasa feodal di bawah feodalisme. Namun, dan untuk berbeda pandangan dari Marx, seperti yang dapat kita lihat, pajak dapat menyulut pemberontakan-pemberontakan yang menjadi revolusi-revolusi sosial. Mengapa ini terjadi? Di bawah kapitalisme, contohnya, memaksakan atau menaikkan pajak kepada para pekerja – sembari mengabaikan, demi tujuan kita, tiap-tiap keuntungan seperti pendidikan dan kesehatan yang didanai oleh pengumpulan pajak yang disediakan bagi para pekerja – dapat mereduksi nilai dari kekuatan kerja. Dalam istilah yang lebih kasar, perubahan-perubahan ini – pajak-pajak baru atau pajak-pajak yang dinaikkan – menurunkan standar hidup para pekerja. Negara kapitalis, dengan demikian, adalah target kemarahan yang disebabkan oleh hilangnya kemampuan nyata untuk berbelanja, yang diakibatkan oleh pajak-pajak baru atau yang dinaikkan. Dalam rezim absolutisme feodal, keharusan bekerja beberapa hari bagi para bangsawan itu jelas bagi semua, dan setiap penarikan pajak dari monarki terhadap para bangsawan mengurangi kemewahan gaya hidup mereka selamanya. Hal ini kemudian menemukan cerminannya dalam tekanan terhadap para petani untuk bekerja lebih lama bagi tuannya, memangkas jatah kelebihan sosial yang diciptakan sendiri oleh para petani ini, yang terkena dampak.

Di bawah tekanan-tekanan keuangan yang begitu besar sebagai satu akibat dari perang-perangnya, Charles I membekukan Parlemen pada 1640. Pertanyaan mengenai kekuasaan dan siapa yang menyerahkannya – seorang Raja dengan hak Ilahiah atau suatu parlemen dari kelas menengah – sekarang menjadi agenda. Agustus 1641, Parlemen dari para lelaki dan wanita yang merupakan borjuasi yang sedang muncul serta bagian-bagian dari bangsawan pemilik tanah menyatakan bahwa Upeti Kapal, penarikannya, pengumpulan daan penghakiman atasnya “bertentangan dengan hukum-hukum dan statuta-statuta wilayah ini” dan telah selalu (yakni, dari awal sekali) bertentangan (Keir 1936). Mereka juga seiring waktu menganggap tak sah penarikan-penarikan feodal lainnya, seperti *purveyance*, penyitaan keprajuritan, dan penciptaan monopoli-monopoli oleh kerajaan.

Selebihnya, seperti yang mereka katakan, ialah sejarah. Jelas bahwa Upeti Kapal, dan lebih umum, hasrat kaum borjuis yang sedang muncul dan hasrat anasir-anasir lain dari kelas menengah untuk bersuara bukan hanya mengenai pajak-pajak yang dibebankan atas mereka untuk mendanai perang waktu itu, tetapi lebih umum, untuk melenyapkan cara-cara lama yang menjadi hambatan bagi perkembangan lebih lanjut kapitalisme di Inggris, merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam pecahnya Revolusi Inggris. Namun, beberapa dari mereka yang terlibat dalam pemberontakan bersuara untuk melindungi posisi-posisi mereka, posisi-posisi yang telah berkembang dalam penyebaran relasi-relasi kapitalis di dalam feodalisme, suatu upaya untuk melindungi-diri dari pemroletaran yang sedang tumbuh dan visi mengenai produksi massal.

Konflik bersenjata antara Raja dan Parlemen, pembagian-pembagian kelas, dan persekutuan-persekutuan yang cair dan bergejolak di dalam kelompok anti-monarki, pendirian Tentara Model Baru, naiknya kediktatoran Cromwell, jatuhnya Republik dan pendirian kembali monarki dengan kekuasaan yang jauh lebih rendah, dan kemudian Revolusi Agung pada 1688, semuanya merupakan akibat dari perpaduan antara perkembangan kapitalisme, hal-hal yang menghambat perkembangan tersebut, baik secara ekonomi atau politik – yakni, relasi-relasi feodal, pemusatan kekuasaan negara di tangan Raja, watak negara, negara milik siapakah – dan dampak-dampak perang dan pajak sebagaimana digambarkan di atas terhadap akumulasi modal, serta terhadap dorongan kaum borjuis dan perwakilan-perwakilan elite lainnya. Semua faktor itu membuka ruang baru bagi masuknya massa ke dalam berbagai perdebatan dan pertarungan. Namun seperti diingatkan Manning (1999, h.2), suara kaum miskin dalam Perang Sipil dan Revolusi tidak terekam secara langsung. Sebaliknya, kita mendengar suara-suara kaum kiri, mereka yang “... berupaya berbicara untuk kaum miskin dan bagian-bagian yang lebih tidak beruntung dari masyarakat”.

Nah, mari kita lihat gagasan-gagasan seperti apa yang diajukan oleh kaum kiri, khususnya kiri jauh (*far left*) selama Revolusi Inggris. Mengambil pendekatan Brian, kiri jauh dalam Revolusi Inggris adalah “orang-orang yang berupaya berbicara untuk kepentingan kaum miskin pekerja dan memobilisasi mereka” (Manning 1999, h. 33). Dalam kategori ini terdapat beberapa kalangan dari kaum Levellers, Ranters, Quakers, Monarkis Kelima, dan Diggers.

Revolusi ini merupakan suatu pelepasan yang niscaya dari rantai-rantai feodal untuk membebaskan proses akumulasi kapital yang memungkinkan penyuburan jangka panjang kapitalisme di Inggris. Langkah-langkah awal yang kuat dan revolusioner untuk

menguniversalkan kapitalisme di Inggris (yang tidak saja melibatkan perubahan pajak dan siapa yang dapat menarik pajak, tetapi sejak tahun 1642 melibatkan Perang Sipil antara dua pihak), juga menghasilkan suatu tanggapan dari salah satu kelompok yang nantinya bertarung melawan Raja dalam Perang Sipil tersebut – kaum Levellers. Kelompok para radikal ini mewakili “gabungan para perajin terampil”, seperti “pedagang, perajin, penjahit keliling, pencetak, dan penyepuh kuningan” (Brockway 1980, h. 24-25). Mereka selain menuntut demokrasi, juga menuntut, antara lain, “pemajakan langsung yang proporsional dengan pendapatan” (Brockway 1980, h. 35). Tuntutan demokrasi bertujuan “melindungi status serta kehidupan mereka” (Walter 1991, h. 120-121; Manning 1999, h. 25).

Perkembangan kapitalisme dan proses pemroletaran pekerja mengancam para petani maupun produsen kecil (Manning 1999). Mereka terancam dengan perampasan ekonomi dan fisik yang sedang berlangsung guna memberi jalan bagi kerja upahan. Sebagai tanggapannya, mereka menginginkan aspirasi agar dunia yang mereka bantu ciptakan dapat berjalan untuk mencegah perubahan lebih jauh, sehingga menguatkan posisi-posisi mereka atau mengatur perubahan itu untuk keuntungan mereka. Secara kontradiktif, beberapa dari mereka memiliki potensi untuk menjadi produsen-produsen kapitalis, mengambil nilai-lebih dari para pekerja. Hal ini benar bagi beberapa petani serta para produsen kecil, walaupun bagi para petani, aristokrasi bertanah-lah yang kemungkinan besar akan menjadi tuan tanah kapitalis atau bergantung pada penyewaan tanah mereka kepada para kapitalis. Di sisi lain, proses perampasan atas para petani menciptakan kondisi bagi perluasan kerja upahan. Seperti dinyatakan Manning, “Revolusi merupakan sebuah fase yang sangat penting dalam mengkristalisasi suatu proto-borjuis dan proto-proletariat” (Manning 1999, h. 21).

Sebagaimana kelas menengah yang memiliki sekumpulan alasan untuk mendukung demokrasi bagi diri mereka, para petani dan massa pekerja memiliki sekumpulan alasan untuk menentang pemroletaran, dan mereka melakukannya (Manning 1999). Bagi para petani, ini dikarenakan mereka sedang bergerak, atau digerakkan, dari suatu masyarakat di mana mereka memiliki tenaga kerja mereka sendiri beserta hasil-hasilnya kepada suatu masyarakat di mana mereka menjualnya kepada orang lain (Manning 1999). Bagi para pekerja upahan paruh waktu, hantu kerja upahan penuh-waktu, dan karenanya kehilangan sarana-sarana kehidupan mereka serta kepemilikan pribadi-lah yang menakutkan mereka. Bagi para pekerja penuh waktu, upah rendah dan pengangguran-lah yang menakutkan mereka dan membuat mereka menentang proses pemroletaran.

Di dalam keadaan suatu krisis masyarakat yang mendalam serta bergejolak, bagian-bagian dari kaum kiri dapat dan akan berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Maka demikianlah, suatu tanggapan dari kaum Levellers terhadap berbagai tuntutan massa pekerja, dan untuk memastikan bahwa unsur-unsur dari masyarakat ini tidak mengancam kelas menengah seiring berlangsungnya Perang Sipil, adalah memperluas program mereka “... ke arah klaim kesetaraan ekonomi dan sosial”, (Manning 1999, h. 13). Tuntutan pemajakan langsung yang progresif merupakan salah satu contoh program ini. Misalnya, kaum Levellers menuntut pajak progresif berdasarkan pemasukan dan kekayaan. Gagasan mengenai kesetaraan primitif tetap “terpatri dalam hati orang banyak” karena masyarakat kelas memang pada dirinya tak setara. Namun seperti didiskusikan di atas, tuntutan kaum Levellers juga mencerminkan posisi sosial kelompok-kelompok yang terancam seiring meluas dan mendalamnya kapitalisme dengan membawa benih-benih industrialisasi. Kelompok-kelompok ini ingin menciptakan suatu negara

berdasarkan citra mereka untuk mencerminkan kepentingan-kepentingan mereka berhadapan dengan angin puyuh yang dihempaskan oleh kapitalisme, dan dalam beberapa hal secara kontradiktif justru menguntungkan borjuasi yang baru muncul. Ini masa ketika, mengutip Marx dan Engels keluar konteks, segala sesuatu yang padat menguap menjadi udara dan segala sesuatu yang suci menjadi profan (Marx & Engels 2008, h. 5), dan dalam hubungan kepada profanitas suci itu, segalanya sedang bergerak dari agama Katolik menuju “agama kapitalisme”, Protestan (Weber 2005; Tawney 1938).

Lagi-lagi kita perlu berhati-hati untuk tidak memaksakan versi kita sendiri mengenai kaum kiri dan kiri jauh terhadap kelompok-kelompok yang lahir pada awal perluasan kapitalisme di Inggris. Kita juga perlu berhati-hati memahami bahwa dalam periode perkembangan umat manusia ini, baru tampak kecil kemampuan kaum miskin dan kelas-kelas pekerja untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka sendiri. Mengingat komposisi-komposisi sosial kelompok-kelompok kiri seperti Levellers dan bahkan Diggers, mereka lebih menceminkan tuntutan-tuntutan dari kelas-kelas yang lebih rendah, daripada bahwa mereka berasal dari kelas-kelas ini dan secara langsung mengekspresikannya. Bagaimanapun, tuntutan-tuntutan tersebut memang dihasilkan dari “pemberontakan rakyat” (Manning 1999) dari bawah yang mengguncang negeri. Kita juga tidak seharusnya meletakkan batasan-batasan tetap dan ketat di antara kaum Levellers dan Diggers dan kelompok-kelompok lainnya di kiri dan kiri jauh. Christopher Hill berpendapat, misalnya, bahwa terdapat kaum kiri dan kaum kanan di dalam Levellers (Hill 1971) dan cairnya situasi dan relasi-relasi sosial (Manning 1999) memperlihatkan beberapa kaum Levellers dan lainnya seperti pengarang anonim *the Tyrannopocrit Discovered* (Hopton 1990) mengikuti gagasan-gagasan dan pendekatan-pendekatan yang paling baik digambarkan sebagai kiri jauh (Manning 1999). Misalnya, dokumen anonim itu berargumen, antara lain, mendukung kewargaan yang setara – suatu negeri di mana raja-raja dan ratu sama setaranya dengan penduduk kota kelas terendah. Penulisnya membayangkan pendidikan massal dan jumlah pendapatan yang sama bagi setiap orang yang hidup (Manning 1999). Setelah mengatakan hal tersebut, kita dapat membuat garis besar perbedaan.

Dalam esensinya, perbedaan antara kelompok Levellers dan kelompok seperti Diggers (atau Levellers sejati, seperti lazimnya mereka disebut-sebut) adalah bahwa Levellers menginginkan kesetaraan politis tetapi tanpa mengancam ketimpangan ekonomi, sementara Diggers menginginkan hak pemilihan umum universal dan kepemilikan bersama – itulah alasan bagi muatan radikal dalam frasa mereka (dan juga para pengusung kesetaraan ekonomi radikal lainnya dalam sejarah), “*the commonwealth*” (Foot 2008). Dalam kata-kata Paul Foot, (Foot 2008, h. 35), “kelompok Levellers mencari kemerdekaan politis yang tidak mengancam satu pun kepemilikan seseorang”. Kelompok Diggers, di sisi lain, menurut salah satu dari pemimpin mereka, Gerrard Winstanley, membayangkan suatu “harta karun bersama” (Foot 2008, h. 35) sebuah dunia radikal mengenai kepemilikan bersama.

Sementara kelompok Levellers hampir tidak berkata apapun mengenai para pekerja upahan (Manning 1999) dan faktanya tidak menginginkan untuk menyetarakan distribusi dalam masyarakat, kelompok Diggers benar-benar melakukannya. Kelompok agitator “kiri jauh” ini (Manning 1999, h. 1) mengklaim, seperti saya sebut di atas, berbicara atas kepentingan pihak kaum miskin dan kelas-kelas pekerja. Umumnya, kelompok Diggers bukanlah kelas-kelas tersebut, atau bahkan dalam kebanyakan kasus, tidak berasal dari kelas-kelas tersebut. Misalnya, Gerrard Winstanley, salah satu pemimpin Diggers yang paling

tersohor, pada 1640 memulai kariernya sebagai seorang pedagang baju di London, beberapa saat menjelang Perang Sipil pecah dan memaksanya berpaling dari baju menuju komunisme (Manning 1999).

Winstanley menyuarakan penghapusan properti pribadi (Manning 1999). Yang lain, seperti pengarang anonim *the Tyrannipocrit Discovered*, berpendapat mengenai redistribusi radikal kekayaan dan pendapatan, seperti misalnya, bahwa segala penghasilan di atas 100£ per-ahun akan diambil dari mereka yang pendapatannya sebesar atau lebih besar (akibatnya, dipajak 100%) dan menyalurkan kembali pendapatan itu kepada mereka yang pendapatannya berada di bawah jumlah itu. Seperti ditunjukkan Manning (1999, h. 49), suatu redistribusi radikal atas kekayaan seperti itu faktanya akan secara efektif menjadi suatu revolusi sosial dan politik. Mengutip Manning, “aspirasi luas redistribusi kekayaan” inilah yang mendefinisikan kelompok kiri jauh dalam Revolusi Inggris dan membedakannya “dari kepemimpinan kelompok Levellers, Monarkis Kelima, dan Quakers”.

Namun, redistribusi atau bahkan suatu kekayaan bersama merupakan sebuah aspirasi yang dalam keadaan ekonomi waktu itu tidak dapat dialamatkan tanpa visi mengenai pemberdayaan warga-warga biasa, bukan saja pemberdayaan melalui parlemen, tetapi melalui perubahan struktural-institusional pada mereka yang dikuasai dan menantang kapitalisme. Walaupun Winstanley memang berpendapat mengenai pemberdayaan ini – ia dicap sebagai sosialis pertama dari kalangan bawah, bertentangan dengan tipe-tipe Stalinis dan Partai Buruh dengan asosiasinya dari atas – rupanya masih terlalu dini suara para kelas pekerja dan kaum miskin cukup kuat didengar atau mampu menciptakan suatu masyarakat setara dan demokratis yang baru (Rees 1999). Seperti dikatakan Cox: “Proletariat yang sedang muncul, dalam kata-kata Edward Bernstein, masih menjadi ‘suatu kelas yang bentuknya belum sempurna’” (Cox 1998). Tentu saja dalam kebangkitan kapitalisme, masih terlalu dini bagi kelas pekerja untuk menjadi kelas yang dominan secara ekonomi atau politik di dalam masyarakat. Kelas pekerja belum menjadi kelas-dalam-dirinya atau sedang berjalan menuju kelas-untuk-dirinya. Ini artinya, kelas sosial yang memiliki kekuatan untuk menerapkan visi Winstanley pada saat itu baru ada dalam tahap awal perkembangannya, dan tentu saja tidak memiliki kekuatan sosial atau pemahaman ideologis untuk menumbangkan sistem itu sendiri yang masih berada dalam tahap awal perkembangannya. Dengan demikian, kematangan kapitalisme dan kelas pekerja memerlukan waktu dua abad lebih jauh sebelum tuntas tercapai, dalam pandangan E.P. Thompson, alih-alih kematangan itu berada dalam proses (Thompson 1963), dan hanya dengan begitu kemungkinan revolusi kelas pekerja dapat menjadi suatu potensi di Inggris, lebih dari sekadar mimpi. Kesempatan ini lahir di Inggris pada 1831-1832 menurut Thompson (Thompson 1963) dan sedikit lebih lama, 1848 dan setelahnya di Eropa. Waktu itu terjadi kebangkitan para pekerja yang mengarah kepada revolusi para pekerja pertama dan protes para pekerja, Komune Paris, meski singkat dua bulan, pada 1871. Hal ini tak terjadi hingga pada abad ke-20 pecah revolusi-revolusi para pekerja di Eropa dan kemudian wilayah-wilayah lainnya di bumi, terutama Rusia pada 1917 dan di Jerman pada 1918. Kedua revolusi kelas pekerja ini secara efektif mengakhiri festival barbarisme yang merupakan konflik para penjajah, setidaknya untuk waktu yang singkat. Namun hal ini akan dianalisis dengan mendalam di lain waktu. Sekarang kita kembali ke 1649.

Visi kaum radikal seperti Winstanley merupakan suatu gerakan kooperasi di dalam masyarakat kapitalis yang sedang berkembang, suatu gerakan kooperasi yang menolak

kepemilikan dalam sebuah masyarakat yang berdasarkan kepemilikan pribadi. Pada 1649 Winstanley menggagas suatu “komunitas kesetaraan di lembah St. George di daerah Surrey” (Manning 1999, h. 59). Tindakan ini, dan pendirian sepuluh atau lebih komunitas semacam itu, bertujuan untuk menyulut massa agar membebaskan diri. Dipadukan dengan contoh komune praktis ini, para Diggers juga menyerukan para pekerja untuk berhenti bekerja –pada intinya mogok serentak – dan menolak membayar sewa. Alasannya tampaknya adalah bahwa *estate-estate* besar akan bangkrut tanpa para pekerja, kerja yang mereka lakukan, dan sewa yang mereka bayar, dan *estate-estate* ini akan bergabung dalam komune-komune untuk memproduksi secukupnya untuk kebutuhan semua orang (Manning 1999).

Kaum Levellers mencela pendekatan Diggers ini sebagai khayalan. Tetapi kaum Levellers juga tidak berada dalam praktik atau bahkan posisi sosial untuk memenangkan tuntutan mereka. Perdebatan Putney, yang berkisar seputar “Persetujuan Rakyat” (*Agreement of People*) para Levellers yang menyerukan demokrasi perwakilan – walaupun awalnya hal ini ambigu mengenai seberapa jauh Persetujuan ini dapat berjalan, tetapi yang pasti, lebih dari 4 persen dari penduduk dapat memberikan suaranya, dan lebih luas daripada yang diinginkan para pimpinan Tentara (Foot 2008) – memperlihatkan kaum Levellers menang dalam perdebatan, tetapi kehilangan kekuatan politik dan argumen (Foot 2008). Tiga tokoh yang sangat kuat memilih untuk menolak Persetujuan, termasuk Letnan Jenderal Oliver Cromwell dan menantunya, Komisaris Jenderal Henry Ireton (Foot 2008). Para pemimpin Tentara, lantaran posisi kepemilikan mereka di masyarakat, tidak akan dan memang tidak dapat membiarkan visi demokratis kaum Levellers dan opsir-opsir agitator menjadi basis bagi sebuah hak pilih (*franchise*) yang diperluas. Mereka takut hal itu akan memperkuat orang-orang yang tak memiliki apa-apa untuk mengambil properti mereka melalui jalan-jalan demokratis dan parlementer.

Debat-debat Dewan Umum Tentara di Putney digelar dengan latar belakang dua pemimpin Levellers yang dijebloskan di penjara, tetapi dengan sejumlah kelompok Levellers dan para opsir dan tentara yang bersimpati kepada kelompok Levellers yang terpilih. Argument-argumen di Putney panjang dan melelahkan, tetapi berpusat seputar seberapa jauh hak pilih parlementer harus berjalan. Perdebatan ini dapat dirangkum dalam dua kutipan. Pertama, dari Kolonel Rainsborough, seorang pendukung hak pilih universal dan kelompok Levellers, yang berkata (Foot 2008, h. 28):

Karena sungguh saya berpikir bahwa orang yang termiskin di Inggris punya hidup untuk dijalani, sebagaimana yang terkaya; dan karenanya dengan tulus, Tuan, saya pikir jelas bahwa setiap manusia yang hidup di bawah suatu pemerintahan haruslah pertama-tama, dengan persetujuannya sendiri, meletakkan dirinya di bawah pemerintahan; dan saya juga berpikir bahwa orang yang termiskin di Inggris tidaklah diikat dalam arti ketat kepada pemerintahan yang dirinya tidak memberikan persetujuan untuk meletakkan dirinya di bawahnya...

Kutipan kedua merangkum pandangan alternatif, pandangan yang memerlukan 300 tahun perjuangan para pekerja dan para perempuan untuk disuarakan terhadap borjuasi Britania. Ireton berkata (Foot 2008, h. 29):

Saya pikir tidak ada seseorang yang memiliki hak atas satu kepentingan atau jatah untuk turut mengatur urusan-urusan kerajaan, dan dalam menentukan atau memilih orang-orang yang harus menentukan hukum-hukum yang dengannya kita harus diatur di sini – Tak ada orang yang memiliki hak atas hal tersebut, tidak ada orang yang tidak memiliki kepentingan tetap dan permanen (*permanent fixed interest*) di dalam kerajaan.

“Kepentingan tetap dan permanen” tentu saja adalah properti. Properti secara melimpah dimiliki oleh orang-orang, tetapi hanya kelompok tertentu – entah bangsawan atau kelas kapitalis yang sedang berkembang dan kelompok-kelompok kelas tengah yang cukup kaya untuk memiliki bidang kecil milik mereka sendiri. Para pekerja dan orang miskin tidak memiliki hak pilih. Pertarungan antara properti, gender, dan kewargaan sebagai dasar pemungutan suara berlanjut berabad-abad. Ini menunjukkan betapa dalamnya ketakutan kelas penguasa di Inggris terhadap para pekerja mereka sendiri, sehingga baru pada 1918, selama Perang Dunia I, visi ini menjadi kenyataan bagi para penduduk laki-laki dewasa Inggris, entah memiliki atau tidak memiliki properti, dan bagi para perempuan yang memiliki properti.

Gerakan Hak Pilih bagi perempuan (*the Suffragette Movement*) memenangi kemenangan parsial pada 1918, yang menjadi kemenangan penuh pada 1928 ketika semua perempuan berusia di atas 21 tahun mendapatkan hak pilih. Pada 1948, 299 tahun setelah perdebatan Putney tentang hak pilih universal di Inggris, penghapusan hak untuk memilih lebih daripada satu kali bagi anggota kelas pemilik properti akhirnya mengamankan hak pilih universal berdasarkan satu orang satu suara di Inggris. Meramalkan apa yang akan saya bahas berkaitan dengan Australia dalam tulisan lain dari rangkaian artikel ini, dampak Perang-Perang Dunia dan peristiwa yang mengikutinya ialah dorongan atas kelas penguasa untuk mengakomodasi kelas pekerja. Seperti dikatakan Quintin Hogg, kelak bergelar Lord Hailsham, kepada *House of Commons* pada 1943: “Beberapa teman yang saya sayangi sepertinya mengabaikan satu atau dua fakta utama tentang reformasi sosial. Yang pertama adalah, jika Anda tidak memberi rakyat reformasi sosial, maka mereka akan memberi Anda revolusi sosial” (Hogg 1943).

Meskipun kelompok Levellers dan pendukung mereka memenangkan pemungutan suara dalam perdebatan Putney mengenai hak pilih yang diperluas, perlawanan kelas penguasa Inggris dan Britania dalam bentuk apapun terhadap tuntutan demokratis dasar selama hampir 300 tahun menunjukkan kekuatan kapitalisme, ketakutan sebenarnya yang diidap kapitalisme, dan – saya tambahkan – ketakutannya terhadap kelas bawah dan ketakberdayaan masyarakat kelas bawah dan kaum kiri yang mewakili mereka untuk memenangkan hak-hak demokratis penuh. Ketakberdayaan ini pada awalnya adalah ketakberdayaan posisi, tetapi pada tahun 1830 dan 1840-an, ini juga termasuk ketakberdayaan kehendak, akibat dominasi kaum sosial-demokrat dan dilema antara menyerah kepada kekuasaan atau menggulingkannya. Tetapi itu cerita yang akan saya jelaskan dalam artikel selanjutnya.

Perjuangan meraih demokrasi selama Perang Sipil Inggris adalah perjuangan borjuasi yang sedang berkembang untuk tumbuh secara ekonomis dan politis dan seiring waktu mengendalikan negara. Ini juga merupakan perjuangan kelas menengah untuk melawan pelanggaran atas posisi-posisi mereka dalam masyarakat yang terus tumbuh, dan secara paradoksal bagi sejumlah bagian dari mereka, untuk mengambil keuntungan sebagai bagian dari kelas borjuis yang baru lahir (Manning 1999). Kelas miskin dan pekerja serta kelompok-kelompok yang muncul untuk mewakili mereka memiliki pendekatan yang sangat berbeda, dengan menuntut hak pilih yang diperluas atau universal bagi laki-laki. Sementara pajak menyulut revolusi, kesetaraan politik – sebagaimana dicontohkan oleh pertarungan demi demokrasi dan taraf demokrasi tersebut – dan kesetaraan ekonomi, seperti dicontohkan oleh kelompok Diggers, berada tepat di jantung revolusi itu. Tetapi berbagai anasir radikal dan

kelas yang mereka wakili belum memiliki kekuatan sosial untuk memenangkan tuntutan-tuntutan demokratis mereka.

Fakta bahwa pajak telah memainkan peran besar dalam memicu revolusi Inggris, namun belum memainkan peran utama dalam memberikan solusi, mencerminkan sifat embrionik kapitalisme secara umum di Inggris pada masa revolusi Inggris, serta kenyataan bahwa pajak merupakan cerminan dari isu-isu sosial yang lebih luas yang dihasilkan oleh krisis. Solusi bagi krisis kapitalis tidak akan ditemukan dalam kebijakan pajak, melainkan dalam penyelesaian atas siapa yang memiliki alat-alat produksi, sifat kepemilikan tersebut, dan siapa yang mengendalikan negara milik siapa.

V. Kesimpulan

Pengantar sejarah pajak Inggris awal ini menunjukkan keterkaitan antara pajak, perang, demokrasi dan pemberontakan, namun hubungan tersebut adalah relasi berdasarkan kelas yang rumit, utamanya ketika demokrasi dibahas. Hasrat akan demokrasi menjadi lebih kuat ketika rantai-rantai feodal ditantang oleh kehadiran kapitalis yang semakin meningkat. Magna Carta adalah perselisihan di antara berbagai unsur dari sesama feodal yang bertikai karena pajak. Para bangsawan hanya dapat berhasil dengan dukungan rakyat London, para petani, buruh, perajin, dan pedagang. Pemberontakan Para Petani adalah perlawanan para petani dan buruh upahan terhadap pajak pemilihan yang dibenci, namun mereka yang memberontak tidak dapat menuntut penggulingan sistem lama karena sistem yang baru belum berkembang cukup kuat. Revolusi Inggris adalah pemberontakan kelas menengah yang terhimpit di antara produksi kapitalis dan pemroletaran. Ia mengawali era kapitalisme, namun negara yang berkembang tidak sepenuhnya demokratis. Sebaliknya, negara berkali-kali dikendalikan oleh para pemilik properti lahan, serta sekelompok kelas kapitalis, para pedagang. Kedua kelompok ini takut suara-suara kelas pekerja dapat menghancurkan hak istimewa dan relasi-relasi properti mereka.

Seperti akan kita lihat di artikel lain dalam seri ini, isu-isu perang, demokrasi, perpajakan, dan pemberontakan ini muncul dan bermain kembali dalam revolusi-revolusi Amerika dan Prancis dan selama Perang-perang Napoleon, dan berikutnya di Inggris sejalan dengan menguat dan menyebarnya kapitalisme dan matangnya kelas pekerja.

Referensi

- Alexander, D., 2015. "Magna Carta: A tradition of rebellion", *Counterfire* 7 June 2015 <http://www.counterfire.org/history/17840-magna-carta-a-tradition-of-rebellion> .
- Alexander, D., (2015a). "Ten reasons why the story of Magna Carta is about rebellion", *Counterfire* 13 June http://www.counterfire.org/history/17859-ten-reasons-why-the-storyof-magna-carta-is-about-rebellion#_ftnref1 .
- Anderson, P., 1964. "The Origins of the Crisis", 23, *New Left Review* (Series I) 26.
- Anderson, P., 1992. *English Questions*. Verso.
- Andrews, K. R., 1991. *Ships, Money, and Politics: Seafaring and Naval Enterprise in the Reign of Charles I* Cambridge University Press.
- Aylmer, G. E., 1957. "The Last Years of Purveyance 1610-1660", 10 (1) *The Economic History*

- Review 81. <http://dx.doi.org/10.2307/2600063>
- Belloc, H., 2003. *Charles I. Gates of Vienna* Books.
- Bennett, M., 1998. *The English Civil War 1640-1649*. Longman.
- Berg, C., 2015. "Magna Carta: archaic tax document and icon of liberty", *The Drum* 11 June 2015
<http://www.abc.net.au/news/2015-06-09/berg-magna-carta-anniversary/6529966> .
- Breay, C., & Harrison, J., 2015. "Magna Carta: an introduction",
<http://www.bl.uk/magnacarta/articles/magna-carta-an-introduction> .
- Brockway, F., 1980. *Britain's First Socialists: The Levellers, Agitators and Diggers of the English Revolution*. Quartet Books.
- Carpenter, D., 2015. *Magna Carta: With a New Commentary by David*. Carpenter Penguin Classics.
- Cox, J., 1999. "Dreams of equality: the levelling poor of the English Revolution - A review of Brian Manning, *The Far Left in the English Revolution 1640 to 1660*", 84, *International Socialism Journal*
<http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj84/cox.htm> .
- Davidson, N., 2012. *How Revolutionary were the Bourgeois Revolutions?*. Haymarket Books.
- Davidson, N., 2015. *We Cannot Escape History: States and Revolutions*. Haymarket Books.
- Dobson, R. B., 1993. *The Peasants' Revolt of 1381*. Macmillan.
- Eden, D., 2015. "Australia you're standing in it part 2: Debt & Social Reproduction", *With Sober Senses*
11 December
https://withsobersenses.wordpress.com/2015/12/11/australiayoure-standing-in-it-part-2-debt-social-reproduction/#_ENREF_15 .
- Eisenman, S. F., 2005. "Communism in Furs: A Dream of Prehistory in William Morris's 'John Ball'", 87
(1) *The Art Bulletin* 92. <http://dx.doi.org/10.1080/00043079.2005.10786230>
- Foot, P., 1981. "This bright day of Summer: The Peasants' Revolt of 1381", *Socialists Unlimited*,
<https://www.marxists.org/archive/foot-paul/1981/06/1381.html>
- Foot, P., 2005. *The Vote* Penguin.
- Harman, C., 2008. *A People's History of the World: From the Stone Age to the New Millennium*. Verso.
- Hill, C., 1966. *The English Revolution 1640*. Lawrence and Wishart.
- Hill, C., 1972. *The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution*. Temple Smith.
- Hill, C., 1974. 'Pottage for Freeborn Englishmen: Attitudes to Wage Labour' in Hill, C., *Change and Community in Seventeenth Century England*. Weidenfeld and Nicolson.
- Hill, C., 2002. *The Century of Revolution 1603-1714* Routledge Classics.
- Hilton, R., and Fagan, H., 1950. *The English Rising of 1381*. Lawrence and Wishart
- Hogg, Q., 1943. British Parliament, Hansard, 17 February.
http://hansard.millbanksystems.com/commons/1943/feb/17/social-insurance-and-alliedservices#S5CV0386P0_19430217_HOC_306 .
- Hopton, A., (ed) 1990. *Tyrannopocrit Discovered*. Aporia Press
- Hughes, J. F., & Oats, L., 2007. "King John's Tax Innovations – Extortion, Resistance, and the Establishment of the Principle of Taxation by Consent", 34 (2) *Accounting Historians Journal* 75
- Hume, D., 1826. *The History of England, Vol. 3*. William Pickering, London, and Talboys and Wheeler, Oxford.
- Keir, D. L., 1936. "The Case of Ship-Money", 52 *Law Quarterly Review* 546
- Konicki, M., 2012. *The Peasants' Revolt*, <https://prezi.com/7iz2q7mqhmq/the-peasantsrevolt/>
- Leonard, H. H., 1978. "Distrain of Knighthood: The Last Phase: 1625-41", 63 (207) *History* 23.
<http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-229X.1978.tb02354.x>
- Lindley, K., "The Part Played by the Catholics", in Manning, B., (ed) 1973 *Politics, Religion and the English Civil War* Edward Arnold, London.
- Lindsay, P., & Groves, R., 1974. *The Peasant Revolt 1381*. Greenwood Press.

- Linebaugh, P., 2008. *Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All*. University of California Press.
- Maddicott, J., 2015. "Magna Carta and the Origins of Parliament", *The Historian*, 125 pp. 22-24.
- Mandel, E., 1980. 'Historical materialism and the capitalist state' transl. Bendien, J., <https://www.marxists.org/.../mandel/1980/xx/hismatstate.htm>
- Mandela, N., 1964. "I am prepared to die", Statement from the Dock at the Opening of the Defence Case in the Rivonia Trial, Pretoria Supreme Court, 20 April 1964 http://www.un.org/en/events/mandeladay/court_statement_1964.shtml .
- Manning, B., 1996. *Aristocrats, Plebeians and Revolution in England 1640-1660*. Pluto Press.
- Manning, B., 1999. *The Far Left in the English Revolution, 1640 to 1660*. Bookmarks.
- Marx, K., 1849. "The Trial of the Rhenish District Committee of Democrats", *Neue Rheinische Zeitung*, No. 231 and 232, February 1849, <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/02/25.htm> .
- Marx, K., 1974. *Capital*, Vol. III, Progress Publishers.
- Marx, K., 1977 *The Grundrisse*. Penguin Books.
- Marx, K., & Engels, F., 2008. *The Communist Manifesto*. Wordworths Editions Ltd.
- Moseley, F., "Hostile Brothers: Marx's Theory of the Distribution of Surplus-Value in Volume 3 of Capital", in Reuten, G., (ed) 2002. *The Culmination of Capital: Essays on Volume 3 of Capital*. Palgrave
- O'Brien, M., 1996. "The Class conflicts which shaped British history", 73 *International Socialism* <http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj73/obrien.htm> .
- O'Brien, M., 2004. "When Adam Delved and Eve Span: A History of the Peasants' Revolt of 1381", New Clarendon Press, <https://andylamas.wordpress.com/2014/06/19/mark-obrienwhen-adam-delved-and-eve-span-a-history-of-the-peasants-revolt-of-1381/> .
- Ormrod, W. M., 1990. "The Peasants' Revolt and the Government of England", 29(1) *Journal of British Studies* 1. <http://dx.doi.org/10.1086/385947>
- Ormrod, W. M., "England in the Middle Ages", in Bonney, R., (ed) 1999. *The Rise of the Fiscal State in Europe c. 1200-1815* Oxford University Press.
- Passant, J., 2015. "Some Basic Marxist Concepts to Help Understand Income Tax", 27 *The Journal Jurisprudence* 263-312.
- Passant, J., 2016. "Historical Note: The History of Taxation is Written in Letters of Blood and Fire", *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 10(2), 93-101.
- Poulantzas, N., 1978. *State, Power, Socialism*. NLB.
- Quintrell, B., 1993. *Charles I 1625 to 1640*. Longman, London
- Rees, J., 1999. 'The socialist revolution and the democratic revolution' 83 *International Socialism Journal* <http://pubs.socialistreviewindex.org.uk/isj83/rees.htm> .
- Robertson, G., 1999. *Crimes against Humanity: The Struggle for Global Justice*. New Press
- Schumpeter, J., "The Crisis of the Tax State", in Swedberg, R., (ed) 1991. *The Economics and Sociology of Capitalism/ Joseph A Schumpeter* Princeton University Press
- Simkin, J., 2014. "Taxation in the 14th Century", *Spartacus Educational* <http://spartacuseducational.com/YALDtaxation.htm> .
- Tawney, R. H., 1938. *Religion and the Rise of Capitalism: a Historical Study*. Penguin Books.
- Thompson, E. P., 1963. *The Making of the English Working Class*. Victor Gollancz Ltd.
- Trevelyan, G., 1915. *England in the Age of Wycliffe*. Longman.
- Vincent, N., 2015. "The Clauses of the Magna Carta", *The British Library* <http://www.bl.uk/magna-carta/articles/the-clauses-of-magna-carta> .

- Walter, J., 1991. "The Impact on Society: a World Turned Upside Down", in Morrill, J., (ed) *The Impact of the English Civil War*, Collins & Brown.
- Weber, M., 2005. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Taylor & Francis eLibrary.
- Wood, E. M 2003. "Christopher Hill and the Recovery of History", *Solidarity*
<https://www.solidarity-us.org/node/619> .

*Artikel ini disebarakan secara swadaya oleh situs independen dan nirlaba **Jurnal Sosialis** (<http://jurnalsosialis.red/>) untuk kepentingan kajian, pergerakan, dan pencerdasan inteligensi kolektif.*